

Analysis of Educational Resource Allocation Strategy: A Case Study on Budget Management

Neneng Nur Hidayah¹, Desriyanti Pulungan²

^{1,2}Department of Management Education, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
Email: bundarama0581@gmail.com; desriyanti4@gmail.com

ABSTRAK

Untuk menjamin berlangsungnya proses pembelajaran dibutuhkan manajemen pembiayaan yang digunakan sebagai acuan dalam mengelola dan mengalokasikan dana pendidikan. Sumber sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat, daerah maupun sumber dana yang berasal dari masyarakat harus dapat dipergunakan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Dana pendidikan harus dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya sesuai dengan skala prioritas yang dibutuhkan untuk keberlangsungan mutu pendidikan yang berkolerasi dengan biaya pendidikan. Pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan yang tepat diharapkan mampu untuk mengatasi kebutuhan dana yang menjadi syarat berlangsungnya proses pembelajaran yang berkualitas.

Keyword: Pengalokasian Sumber Daya; Pengelolaan Anggaran; Pendidikan

ABSTRACT

To ensure the learning process takes place, financing management is needed which is used as a reference in managing and allocating education funds. Sources of funds originating from the central, regional and community sources of funds must be used effectively in order to achieve educational goals. Education funds must be accountable for their use in accordance with the priority scale needed for the sustainability of the quality of education which correlates with the cost of education. It is hoped that proper management and allocation of education funds will be able to address the need for funds which are a prerequisite for a quality learning process.

Keyword: Resource Allocation; Budget Management; Education

Corresponding Author:

Neneng Nur Hidayah,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Jl. Denai No.217, Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan,
Sumatera Utara 20371, Indonesia
Email: bundarama0581@gmail.com



1. INTRODUCTION

Dalam sebuah lembaga pendidikan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya pendidikan dengan baik dan benar merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Pengembangan sumber daya dalam bidang pendidikan merupakan suatu usaha peningkatan untuk mencapai hasil yang optimal. Melalui pengembangan tersebut akan terbentuk sumber daya pendidikan yang berkualitas.

Aktivitas manajerial di sekolah dikelompokkan ke dalam tiga domain yaitu: input; proses dan output. Ketiga tahapan ini merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi antar satu dengan yang lainnya, terkhusus pada fase proses. Agar proses dapat berlangsung lancar, efektif dan efisien, maka ada beberapa unsur yang memainkan peran, mendukung dan bahkan berpengaruh besar terhadap keberhasilan terselenggaranya proses dalam suatu organisasi khususnya dunia pendidikan. Unsur pendukung tadi oleh para ahli disebut “sumber daya pendidikan” (education resources). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana, dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama”. Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada point 23 disebutkan bahwa “Sumber daya pendidikan adalah

segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana”.

Berkaitan dengan hal ini, Komariah dan Cepi Triatna (2005) menyatakan bahwa Sumber Daya Pendidikan terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) Manusia, (2) Uang, (3) Metode, (4) Bahan-bahan, dan (5) Mesin-mesin”. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Terry (1964) bahwa 5 (lima) unsur sumber daya dalam manajemen terdiri dari: “Men, Methods, Money, Materials, and Machines”. Akan tetapi, oleh Ukas (1997) pendapat ini disempurnahkan dengan menambahkan satu point lagi, yakni “pasar” (market).

Dengan demikian, pengertian Manajemen Sumber Daya Pendidikan (MSDP) dalam arti luas dikelompokkan ke dalam enam aspek dan sering disingkat dengan istilah “6 M”, yakni:

1. Men (manusia; siswa, guru, tenaga dan unsur kependidikan lainnya)
2. Methods (metode-metode; kurikulum)
3. Materials (bahan-bahan; sarana dan prasarana)
4. Money (uang atau dana)
5. Machines (mesin-mesin; teknologi pendidikan), dan
6. Market (pasar atau pemasaran)

Salah satu komponen aspek yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya pendidikan adalah dana yang erat keterkaitannya dengan anggaran. Pengelolaan anggaran yang baik dan benar dengan sumber dana yang memadai akan mewujudkan pembelajaran yang baik sehingga akan menghasilkan mutu pendidikan yang baik juga. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah terselenggaranya proses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik yang diharapkan. (Usman, 2017).

Mutu pendidikan sangat berkorelasi dengan sumber daya manusia yang menjalankan fungsi struktur organisasi secara tepat. Dalam menjalankan roda organisasi lembaga pendidikan membutuhkan pemimpin yang dapat mengefektifkan sumberdaya menjadi sumber kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. (Sukino, 2016) Hal ini karena lembaga pendidikan merupakan sarana investasi sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kunci pembangunan ekonomi suatu bangsa.

Investasi di bidang sumber daya manusia pada prinsip hampir sama dengan konsep investasi manusia yang nilainya bisa berkembang melalui proses pengembangan dari pendidikan yang telah ditempuh. (Syaiful Sagala 2011). Mengingat pentingnya investasi SDM untuk kepentingan ekonomi bangsa Indonesia kedepan maka diterbitkan UUNo 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 “Dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional.

Berlakunya otonomi daerah memberi kewenangan dan peran yang lebih besar dalam mengelola pendidikan sampai ketingkat madrasah. Pendanaan pendidikan dan penyaluran dana sampai ke tingkat madrasah berasal dari berbagai sumber yaitu 1) desentralisasi yaitu dana dialokasikan dari dana pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/ kota dalam bentuk DAU dan DAK, selanjutnya pemerintah kabupaten/ kota mengalokasikan dana tersebut melalui APBD untuk sektor pendidikan 2) dekonsetrasi yaitu dana dialokasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, dari provinsi dana disalurkan ke madrasah atau ke pemerintah kabupaten/ kota dan diteruskan ke madrasah c) blockgrant dimana dana dialokasikan langsung dari pemerintah pusat ke madrasah dalam berbagai bentuk. Di tingkat madrasah ini, kepala madrasah memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber sumber tersebut (Suwandi 2012).

Kepala Satuan pendidikan memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan pertanggungjawaban keuangan sekolah (Mulyasa: 2005:190), (Masditou 2017). Dana pendidikan di sekolah direncanakan dan dialokasikan secara baik dan tepat sesuai kebutuhan dan dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan pendidikan. Dana pendidikan juga harus diorganisir secara baik dan tepat sasaran. Menurut undang undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 48, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan harus dapat melakukan pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan yang berasal dari berbagai sumber untuk membiayai pendidikan secara tepat sehingga tidak ada dana yang pengalokasiannya menimbulkan terjadinya ketidakadilan. (Gitman & Zutter, 2015) dan terjadi tumpang tindih sehingga perlu dibuat mekanisme pendanaan pendidikan yang tepat sehingga dana yang ada dapat dialokasikan secara adil, merata, efisien dan efektif.

2. RESEARCH METHOD

Data yang dikumpulkan oleh penulis berhubungan dengan topik yang dibahas dan ditelaah dalam artikel ini dan diambil dari data primer dan sekunder, dibahas menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini dikenal sebagai studi kepustakaan (Library research). Beberapa sumber yang digunakan oleh penulis seperti buku, jurnal, artikel, dan makalah.

3. RESULTS AND DISCUSSION

A. *Pengelolaan Anggaran Pendidikan*

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan, yang diatur dalam Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), dikenal sebagai pengelolaan dana pendidikan. Rencana kerja RKS/RKM dirancang dan dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru, pegawai, dan komite sekolah selama empat tahun dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pengelolaan keuangan akan dilakukan setelah RKJM diubah menjadi Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam RAPBM yang meliputi semua tugas yang diberikan untuk menyelenggarakan pendidikan, termasuk perencanaan, penggunaan, pencatatan laporan, dan pertanggung jawaban yang bertujuan untuk memastikan administrasi yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Menjadi efektif dan efisien adalah inti dari pengelolaan keuangan.

Keberhasilan program pembangunan pendidikan bergantung pada kemampuan SDM untuk mengelola dana yang tersedia dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok dan tingkat prioritas program pembangunan pendidikan secara bertahap setiap tahun ke tahun berikutnya dan terus menerus seperti yang direncanakan oleh program. Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa", pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan. Anwar Arifin, 2013.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikan, yang merupakan tanggung jawab bersama (Arifin n.d.). Pembiayaan pendidikan merupakan hubungan yang saling berkaitan di mana terdapat komponen-komponen yang menjadi mikro dan makro dalam konteks pendidikan. Setiap bagian melakukan tugas yang berbeda, tetapi semua memiliki tujuan yang sama: 1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 2) menyediakan bagian-bagian dari sumber pembiayaan pendidikan; 3) menentukan sistem dan mekanisme pengalokasian dana; 4) penggunaan dana yang efektif dan efisien; 5) akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan); dan 6) mengurangi masalah yang terkait dengan penggunaan pembiayaan pendidikan (Ferdinandus, 2015).

Pembiayaan pendidikan, yang merupakan bagian dari penerapan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS), pada dasarnya melibatkan konsep pengelolaan anggaran pendidikan dengan tujuan untuk menggunakan sumber pembiayaan secara efektif dan efisien dengan harapan tujuan pendidikan dapat tercapai sebaik mungkin. Untuk menangani masalah kebutuhan yang beragam dan keterbatasan dana, madrasah harus mampu membuat keputusan dengan tetap berpedoman pada peningkatan mutu. Jika mereka menghadapi masalah keuangan yang terbatas, mereka harus mempertimbangkan skala prioritas yang dianggap memiliki pengaruh yang paling besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Kepala sekolah harus menggunakan manajemen strategik yang berfungsi untuk mengelola dana pendidikan dengan efektif dan efisien sambil memperhatikan skala prioritas dana yang tersedia. Untuk melakukan ini, kepala sekolah harus mengarahkan operasi internal organisasi, yang mencakup alokasi sumber daya manusia, sarana fisik, dan dana keuangan. Strategi yang dapat digunakan oleh kepala sekolah sebagai implementasi MBS adalah 1) melakukan analisis internal dan eksternal terhadap semua potensi sumber daya. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengelola dana pendidikan (Mulyasa, 2003).

1) *Perencanaan Pengelolaan Dana Pendidikan*

Perencanaan dalam manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Dalam hal ini Gordon dalam Manajemen berbasis sekolah (Mulyasa: 2003:73) penyusunan anggaran pendidikan melalui dua pendekatan yaitu, yaitu pendekatan tradisional dan *Planning Programming Budgeting System* (PPBS) (Mulyasa 2003).

The traditional Approach Steges (1) As certain teacher needs in the areas of supplies, book, etc, (2) Determine the merits of teacher budgets requests on the basis of perceived need (3) Estimate the cost catagories of need, e.g. instruction supplies books, etc. PPBS Stages (1) Asseses educational needs; (2) Define educational objectives and criteria and methods to be used in evaluating the objectives; (3) Detemine programs and cost sstimate the resaource needed to carry out programs; (5) Organize the budget around program areas and objective

Penganggaran terdiri dari dua bagian: perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Dalam penyusunan anggaran, perkiraan dan penggunaan anggran pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dicapai. Lipman (1985) dalam Mulyasa. Tiga perspektif berbeda digunakan dalam penganggaran: 1) Pendekatan komparatif, yang melibatkan perbandingan jumlah pengeluaran dan penerimaan untuk setiap bagian anggaran setiap tahun; 2) Evaluasi Penganggaran Rencana Program, yang berfokus pada rencana dan sasaran program secara khusus dan umum; dan 3) Pendekatan Fungsional, yang menganalisis anggaran antara dana pelaksanaan dan rencana menggunakan analisis anggaran nol.

2) Proses Penyusunan Anggaran

Proses penyusunan anggaran disusun melalui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) meliputi (1) sumber pendapatan (2) pengeluaran, misalnya untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber belajar dan alat pelajaran dan honor serta kesejahteraan. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini (Lipham, 1985) mengungkapkan empat fase kegiatan yaitu:

- a) Merencanakan anggaran, kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisa Cost-effectiveness, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran.
- b) Mempersiapkan anggaran, yaitu menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi dan sasaran program pengajaran serta dirumuskan dengan jelas, melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan-bahan yang tersedia.
- c) Mengelola pelaksanaan anggaran, yaitu mempersiapkan administrasi, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- d) Menilai pelaksanaan anggaran, menilai proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

3) Proses Pengaturan Anggaran

Proses Pengaturan Anggaran meliputi:

- 1) Penerimaan, bersumber dari pemerintah, orang tua dan masyarakat
- 2) Penggunaan
- 3) Pertanggungjawaban anggaran

Dalam pengelolaan keuangan diperlukan ketelitian dalam mengatur keuangan. Pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan atau sekolah dikelola oleh manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas mengatur jalannya keuangan yang ada di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, seorang manajer keuangan harus memiliki langkah-langkah yang tepat agar apa yang ia kerjakan bisa memberikan kelancaran pada lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain adanya perencanaan, adanya sumber daya manusia yang jujur, loyal, dan berkualitas, dan adanya manajer keuangan yang terbuka, tegas dan transparan dalam setiap tugasnya. (Masditou 2017) Ada beberapa aspek penting yang harus dipahami dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan, yaitu konsep penganggaran pendidikan pengklasifikasian kegiatan, penentuan standarisasi, dan penentuan biaya satuan dalam penganggaran pendidikan. (Martin 2014).

B. Pengalokasian Anggaran Pendidikan

Pengalokasian atau distribusi anggaran pendidikan adalah suatu rencana penetapan jumlah dan prioritas uang yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah (Depdiknas: 2009). Dalam konteks ini fungsi pemimpin madrasah/sekolah sangat menentukan karena pengambil kebijakan dalam masalah anggaran ditentukan oleh kepala sekolah. (Rohmat, 2016) Dalam rangka pengalokasian dana pendidikan selalu mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM), yang penyusunannya bisa dilakukan secara rutin tiap satu tahun sekali dan bisa dilakukan tiap semester dilakukan oleh kepala madrasah, guru, siswa, bendahara dan komite sekolah sesuai dengan tahapan penyusunan anggaran (Fatah, 2012) mengungkapkan anggaran mempunyai fungsi manajemen, baik perencanaan maupun pengawasan. Oleh karena itu, ketepatan desain anggaran menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan. (Ainul Mardiyah Usman 2017). Pihak madrasah menyusun RAPBS berdasarkan anggaran rutin meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, biaya pemeliharaan, serta belanja modal. APBK diperuntukkan untuk insentif wali kelas. Pengalokasian dana yang bersumber dari APBN diperuntukkan untuk pengembangan kompetensi lulusan seperti biaya insentif pengayaan sore hari, pengembangan profesi guru, pembiayaan remedial dan pengayaan, PMR dan rehabilitasi gedung, pengadaan mebel yang dianggap sedang dan tidak terlalu besar dana yang dibutuhkan. Adapun pengalokasian dana pendidikan dapat diperuntukkan sebagai berikut:

1) Pengalokasian Dana DIPA

Menurut undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan undang-undang No 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada suatu tahun anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Adapun penggunaan dana DIPA adalah sebagai berikut

- a) Belanja pegawai (kode 51)
- b) Belanja barang (kode 52)

c) Belanja modal (kode 53)
 d) Belanja gaji pegawai, belanja tunjangan seperti sertifikasi dan tunjangan
 2) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
 Adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, Adapun dana BOS dialokasikan sebagai berikut

- 1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB)
- 2) Pengembangan perpustakaan
- 3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler
- 4) Kegiatan asesmen /evaluasi pembelajaran
- 5) Administrasi kegiatan sekolah
- 6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- 7) Layanan daya dan jasa
- 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- 9) Penyediaan alat multimedia pembelajaran
- 10) Pembayaran guru berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 3) Komite Sekolah

Komite sekolah merupakan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah dibentuk atas prakarsa dari masyarakat dan sudah diatur dalam UUSPN No 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3 menyatakan komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi komite sekolah harus mampu menyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Salah satu peran sekolah adalah mobilisasi sumbangan. Adapun penggunaan dana komite di alokasikan antara lain

1. Pengadaan sarana dan prasarana
 - a. Pengadaan toilet siswa
 - b. Pembuatan sarana olah raga
 - c. Pembuatan gedung aula
 - d. Pembuatan ruang kelas
2. Dana sosial untuk siswa sakit
3. Penghargaan siswa berprestasi dan beasiswa siswa berprestasi jalur akademik maupun non akademik
4. Kegiatan kreatifitas siswa
 - a. Karnaval
 - b. Acara pentas seni pada saat pelepasan siswa baru
 - c. Bulan bahasa
 - d. Expo kampus
 - e. Kegiatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional

Seluruh pengalokasian dana harus selalu di evaluasi bertujuan untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salah, serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pencegahan dari kesalahan agar tidak terulang kembali merupakan fungsi evaluasi yang valid. Evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan sekolah dapat diidentifikasi ke dalam tiga hal, yaitu pendekatan pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggung jawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah. Monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan sekolah standar nasional yang salah satunya yaitu membahas tentang standar pembiayaan sekolah antara lain (Kementrian Pendidikan Nasional 2010).

Tabel 1. Jenis Dokumen SNP

No.	Komponen	Aspek	Jenis Dokumen SNP
1	Biaya Investasi	Penyusunan RAPBM	Dokumen keterlibatan stakeholders dalam menyusun RKS dan RKAS untuk pengembangan investasi sekolah
		Sarana dan Prasarana	Dokumen catatan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara menyeluruh
		Pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan	Dokumen pembelanjaan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan RKAS untuk pemenuhan SNP

No.	Komponen	Aspek	Jenis Dokumen SNP
2	Modal Kerja		Dokumen modal kerja (operasional) untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan selama satu tahun terakhir untuk pemenuhan SNP
3	Biaya Operasional	Gaji Pendidik	Dokumen pembayaran gaji insentif, transport, dan tunjangan lain-lain pendidik pada tahun berjalan untuk pemenuhan SNP
		Gaji tenaga Kependidikan	Dokumen pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain-lain tenaga kependidikan pada tahun berjalan untuk pemenuhan SNP
		Kegiatan Pembelajaran	Dokumen pengalokasian Biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama Tiga tahun terakhir untuk pemenuhan SNP
		Kegiatan Kesiswaan	Dokumen pengalokasian dana untuk kegiatan kesiswaan untuk pemenuhan SNP
		ATK	Dokumen pengeluaran Biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran dalam pemenuhan SNP
		Bahan habis pakai	Dokumen pengeluaran biaya pengadaan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran
		Alat habis pakai	Dokumen pengeluaran biaya pengadaan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran
		Kegiatan Rapat	Dokumen pengeluaran biaya pengadaan rapat
		Transport dan perjalanan dinas	Dokumen pengeluaran biaya transport dan perjalanan dinas
		Penggandaan soal soal ujian	Dokumen biaya pengeluaran penggandaan soal ujian
4	Biaya operasional	Kegiatan operasional pendidikan tidak langsung	Dokumen pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan operasional Tidak langsung selama tiga tahun terakhir
		Sumbangan pendidikan	Dokumen bukti penggunaan sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan
		Uang sekolah	Dokumen pemungutan atau sumbangan uang sekolah
		Subsidi silang	Dokumen subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
		Biaya operasional lain	Dokumen penggalangan biaya operasional lain disamping iuran Komite rutin dan fisik sekolah
		Penetapan biaya operasional	Dokumen pengambilan keputusan dalam penetapan dana Dari masyarakat sebagai biaya operasional dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak
		Pengelolaan biaya operasional	Dokumen pengelolaan dana dari masyarakat
5	Transparansi dan akuntabilitas	Pedoman pengelolaan keuangan	Dokumen pedoman pengelolaan

No.	Komponen	Aspek	Jenis Dokumen SNP
			keuangan sebagaidasardalam penyusunan RKAS (RAPBS)
		Pembukuan biaya operasional	Dokumen pembukuan biaya operasional
		Laporan pertanggung jawaban	Dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya pada pemerintah atau Yayasan dokumen hasil audit penggunaan dana

Dari seluruh tahapan pengelolaan dan pengalokasian dana kegiatan evaluasi merupakan tahapan terakhir setelah tahap perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Evaluasi didefinisikan oleh Nanang Fattah sebagai proses pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Fattah juga mengemukakan bahwa diantara tujuan evaluasi adalah untuk

a. Memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus.

b. Menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi kepada penggunaan sumber daya pendidikan (manusia atau tenaga, sarana dan prasarana, biaya) secara efisien dan ekonomis.

4. CONCLUSION

Pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang selanjutnya akan diwujudkan dalam RKS/RKM yang merupakan rencana kerja yang memiliki jangka waktu empat tahun yang disusun dan dilaksanakan oleh kepala madrasah, guru, pegawai beserta komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Dari RKM selanjutnya akan diturunkan menjadi Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan yang selanjutnya akan diwujudkan ke dalam RAPBM.

Dalam rangka pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan engambil kebijakan (pimpinan sekolah/madrasah) harus selalu berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai upaya mengelola dana pendidikan yang efektif dan efisien dan memperhatikan skala prioritas dari ketersediaan dana dengan mempertimbangan antara ketersediaan dana dengan kebutuhan yang lebih utama dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

REFERENCES

- Ainul Mardiyah Usman, dkk. (2017). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Pada SMP Negeri 19 Pecontohan Banda Aceh. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala*, ISSN 2302-0156 pp. 235-249, Volume 5. No 4. November
- Anwar Arifin, (2003). *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang Undang SISDIKNAS*, Departemen Agama RI Jakarta
- Brzozowski, M., & Ferster, I. (2016). Educational Management Leadership. In *Educational Leadership and Administration*. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1624-8.ch001>
- Cobb-Clark, D. A., & Jha, N (2016). Educational Achievement and the Allocation of School Resources. *Australian Economic Review*. <https://doi.org/10.1111/1467-8462.12159>
- Ferdi W, P. (2015). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol 19 Nomor 4. Desember.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2015). *Principles of Managerial Finance 14th Edition*. In Pearson Education.
- Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.14421/manageria.2020.51-01>
- Kementerian Pendidikan Nasional (2010). *Instrument Dokumen Portofolio*, Jakarta.
- Martin (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Masditou (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. *Jurnal Ansiru PAI* vol.1 No.2. Juli-Des.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*. PT Bumi Aksara.
- Nanang Fattah (2006). *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahmah, N. (2016). Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*. <https://doi.org/10.24256/kelola.v1i1.430>
- Rohmat (2016). Relasi Kepemimpinan dan Kultur Sekolah. *Jurnal Kependidikan Insania*.
- Sari, D. N. A. (2018). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*.
- Sukino, A. (2016). Kepemimpinan Transformatif dalam Pengembangan Manajemen Madrasah Berorientasi Mutu. *An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v3i1.10>

- Suwandi (2012). Arah Kebijakan Pemanfaatan dan Penyaluran Dana Pendidikan pada Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Vol 21. No 2167
- Syaiful Sagala (2011). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah*. ALFABETA: Bandung.
- Usman, J. (2017). Urgensi Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v11i2.1170>